

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2000).

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara dalam rangka pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, salah satu mekanisme pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *withholding system*. *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini adalah Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan, yang kemudian akan disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak. Salah satu jenis PPh yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya (Supramono, 2006).

Pada dasarnya tidak satupun orang atau perusahaan yang senang membayar pajak. Wajib pajak akan mencoba untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan. Wajib pajak juga berusaha menghindari pajak secara ilegal selama pajak tersebut mempunyai alasan yang tepat dan tidak mengakibatkannya dituntun secara hukum. Setiap perusahaan sebagai wajib pajak, dalam membayar pajak tentu menginginkan jumlah yang seminimal mungkin atau dapat menghemat pajak (*tax saving*). Oleh sebab itu, meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan (Djoko Muljono, 2004).

Dalam perhitungan laba rugi, perhitungan besarnya pajak yang dikenakan pada karyawan yang ditanggung perusahaan (*nett method*), PPh atas karyawan yang ditanggung perusahaan, akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak yang akan dibayar perusahaan pun akan menjadi besar pula. (<http://www.pajakupdate.com/berita/158-grossup-method-pphps21.html>)

Pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil bila menggunakan *gross up method*. *Gross up method* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah. Untuk pajak ditanggung oleh Perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar PPh pasal 21 karyawan tersebut tidak dimasukkan kedalam komponen penghasilan karyawan. Jadi jika tidak diakui sebagai penghasilan bagi karyawan, maka tidak dapat dibiayakan dalam PPh badan (<http://typecat.com/PERENCANAAN-PAJAK-DENGAN-METODE-GROSS-UP-DALAM-PERHITUNGAN-PPH.>).

PT INTI (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS yang bergerak dalam

bidang peralatan telekomunikasi. Dalam pemotongan pajaknya PT INTI masih menggunakan *Nett Method* (ditanggung perusahaan).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang dengan Menggunakan *Nett Method* dan *Gross Up Method* Dalam Meningkatkan Penghematan Pembayaran Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang Berlaku” (Studi kasus pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari masalah tersebut, maka masalah-masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, jika Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan (*Nett Method*) pada PT INTI (Persero)?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, jika Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan dengan *gross up method* pada PT INTI (Persero)?
3. Bagaimana Perbandingan Perhitungan dengan Menggunakan *Nett Method* dan *Gross Up Method* dalam meningkatkan penghematan pembayaran pajak pada PT INTI (Persero)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jika jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang ditanggung oleh perusahaan (*Nett Method*) pada PT INTI (Persero).
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jika jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang ditanggung oleh perusahaan dengan *gross up method* pada PT INTI (Persero).
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan dengan Menggunakan *Nett Method* dan *Gross Up Method* dalam meningkatkan penghematan pembayaran pajak pada PT INTI (Persero).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Kegunaan bagi Lembaga Perguruan Tinggi  
Kegunaan bagi lembaga perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Kristen Maranatha diharapkan dapat menambah data dan informasi sebagai masukan terhadap mata kuliah yang bersangkutan.
- b. Kegunaan bagi Perusahaan,  
yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

c. Kegunaan bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Kegunaan bagi Masyarakat dan Pihak Lainnya

Kegunaan bagi masyarakat dan pihak lainnya, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi untuk kegiatan ilmiah atau dalam hal yang sama sebagai bahan pertimbangan untuk yang lainnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran.**

Penggunaan metode yang berbeda dalam perhitungan PPh Pasal 21, akan menghasilkan dampak yang berbeda pula terhadap besarnya pajak yang terutang bagi perusahaan. Perbedaan jumlah PPh terutang yang merupakan beban pegawai bagi perusahaan, akan berpengaruh terhadap pencapaian laba (rugi) perusahaan.

Pajak penghasilan atas gaji pegawai yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan dalam beban gaji pegawai, sehingga beban pegawai lebih kecil jika dibandingkan dengan pemberian tunjangan pajak terhadap pegawai atas pajak penghasilan yang terutang.

Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah pengurang penghasilan akan lebih kecil jika pajak penghasilan atas pegawai ditanggung perusahaan (*Nett Method*),

sebaliknya jika perusahaan memberikan tunjangan pajak (*Gross up method*), maka biaya gaji pegawai akan lebih besar. Peningkatan jumlah biaya akan berpengaruh terhadap laba perusahaan, semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin berkurang pula jumlah laba yang diperoleh. Pengurangan laba akibat pemberian tunjangan pajak terhadap pegawai, akan meminimalkan jumlah pajak penghasilan perusahaan, hal ini karena jumlah laba perusahaan yang lebih kecil sehingga pajak perusahaan pun akan lebih kecil. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian:

Gambar 1

## Skema Kerangka Pemikiran

